



Hari Ini DPRD Gelar Hak Angket Ahok Pantang Mundur

GAMBIR (Pos Kota) – Diancam hak angket oleh DPRD, Gubernur DKI Ahok pantang mundur. Ia menegaskan siap menghadapinya meski resikonya dilengserkan, bahkan harus masuk penjara sekalipun.

"Saya siap jika harus turun jadi gubernur. Angket itu hak dewan. Hari ini (kemarin-red) kan belum angket nih, suruh angket dulu dong, biar nanti saya juga angketin mereka. Biar seru," ujar Ahok di Balaikota, Rabu (25/2).

"Nanti tinggal hitung-hitungan saja, siapa yang masuk penjara. Apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara, kan bagus masuk penjara rame-rame. Saya tak takut dilengserkan."

Hal itu dilontarkan Ahok mengomentari rencana DPRD menggelar sidang paripurna hak angket, yang rencananya dilaksanakan di gedung dewan, Kamis (26/2) pukul 14.00.

"Saya akan tetap pada pendirian bahwa APBD 2015 yang kami ajukan ke Kemendagri adalah yang benar dan sah," tegas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

ANGGARAN SILUMAN

Ahok mengungkapkan pihaknya menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun setelah draft APBD 2015 yang disahkan dikirim ke Kemendagri.

"Sebelum paripurna 27 Januari itu Dewan tidak masukin apapun. Lalu, dewan usai paripurna membahas pemotongan anggaran sebanyak 10-15 persen dari ribuan kegiatan dalam APBD 2015 agar dana senilai Rp 12,1 triliun tersebut bisa masuk," ungkap Ahok.

Adapun dana tersebut, tambah Ahok, untuk proyek pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berharga miliaran rupiah per unit. "Alat

ini untuk kebutuhan pelayanan di kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat saja. Dan masih banyak lagi itemnya," tuturnya.

LANGGAR ATURAN

Sebaliknya dewan menuding Ahok telah melanggar aturan menyerahkan draft APBD yang bukan hasil pembahasan dengan dewan. "Sebab banyak item anggaran yang mencurigakan. Contoh dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diajukan sebesar Rp3 triliun untuk 600 ribu siswa miskin. Berdasarkan hitungan kasar untuk membantu siswa sebanyak itu cuma butuh Rp1,3 triliun. Lalu akan dikemanakan yang Rp 1,7 triliun," kritik anggota Banggar DPRD Fahmi Hasi-buan.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah dan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai kedua pihak jangan kelamaan terlibat debat soal APBD. (joko/st/o)